

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA SE-BALI

Desak Gede Yudi Atika Sari Putu Kepramareni Ni Luh Gde Novitasari*

Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati

*E-Mail: luhgedenovitasari@yahoo.com

DiPublikasi: 31/07/2017

Halaman: 15 - 29

DOI: 10.22225.KR.9.1.325.15-29

Abstract

Local governments in allocating funds with capital expenditure budgets in the form of APBD to add fixed assets. During this shopping area is used more for routine expenditures are relatively less productive. The goal of the research is to find out whether there is influence of economic growth, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) against the allocation of capital expenditure on district/city governments in Bali. The population in this study is the Government district/city in Bali which consists of 8 (eight) regencies and one (1) year period 2012-2015 cities. This study uses secondary data in the form of Government APBD Report Kabupaten/Kota in Bali. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression. The results of this research, namely economic growth, General Allocation funds, funds for a special allocation of funds and the result did not affect the allocation of capital expenditure, while the original revenue area and the rest of the more positive against the influential budget financing allocation of capital expenditures.

Keywords: Economic growth, income allocation fund, native speaking, funds for a special allocation of funds, the results, the rest of the financing of the budget, the allocation of more capital spending.

Abstrak

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana dengan bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota periode tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran, alokasi belanja modal.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat perekonomian daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU

No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Pemerintah Daerah menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain perlunya dilakukan reformasi anggaran, khususnya reformasi APBD.

APBD sebagaimana yang ada dalam Pasal 1 Ayat (17) UU No. 33 Tahun 2004, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, untuk menjalankan pemerintahan diharuskan menyusun rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun ke depan, dan harus adanya tujuan tertentu. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran.

Tiga komponen APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Jika komponen ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah. Halim (2008:100) menjelaskan bahwa Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program kegiatan dan Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan program seperti belanja modal.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan berbentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Suratno, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi alokasi belanja modal. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004,

salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien (Wandira, 2012). Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk pembangunan. Penerimaan daerah seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan. UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana dari Pemerintah Pusat digunakan Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Pengalihan dana diwujudkan bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang dan tidak termasuk penyertaan modal.

Selain dari PAD dan transter dari pusat untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Fakhunnizar (2014) yang menyebutkan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Agen

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Arya (2016) adalah sebuah kontrak diantara dua pihak antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk pengambilan keputusan atas nama prinsipal. Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat dan daerah. Teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006).

2. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan masa manfaat, meningkatkan kualitas aset. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta benda tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan salah satu syarat dalam memberikan pelayanan publik.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi salah satu faktor adanya pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat. Dengan perkataan lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan diukur dengan menggunakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atau pendapatan nilai akhir pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah, semakin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan untuk membantu keuangan daerah.

5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah.

Dana Alokasi Umum bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

6. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi

Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan investasi, dan transfer rekening cadangan. SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA adalah indikator efisiensi, karena SiLPA akan berbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.

B. Hipotesis

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan berbentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan

lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Suratno, 2010).

Pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda yang sesuai dengan potensi tiap daerah sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi tentu akan tumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat. Dengan perkataan lain pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atau pendapatan nilai akhir pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi berkelanjutan (Putro, 2010).

Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor tersebut antara lain yaitu sumber daya alam, investasi, teknologi, industri, kewirausahaan dan pengeluaran pemerintah dan dukungan pemerintah. Yovita (2011) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal, Darwanto dan Yustikasari (2007) berpendapat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan argumen diatas dapat disimpulkan bahwa dengan kebijakan ekonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan timbulnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal ini yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah, semakin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan untuk membantu keuangan daerah.

Haryuli (2013) menyatakan pendapatan asli

daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal dan didukung dengan Kusnandar dan Dodik berpendapat PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD sebesar-besarnya. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Suratno (2009) dan Sumarni (2008) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak terjadi lebih baik, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan meningkat. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi Belanja Modal guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Secara teoritis, dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang berpotensi apabila dialokasikan untuk anggaran belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wandira (2012) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Wandhira (2012) menyatakan terdapat pengaruh positif antara DBH terhadap Belanja Modal. Haryuli (2013) menyatakan terdapat pengaruh positif antara DBH terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat disimpulkan Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dan alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Wandhira (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara DAK terhadap Belanja Modal, Oktora dan Pontoh (2013) berpendapat DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan adanya pemanfaatan DAK untuk kegiatan diharapkan meningkatkan pelayanan publik yang direlaskan dalam belanja modal. Latifah (2010)

membuktikan bahwa dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Berdasarkan pemaparan teori diatas dapat disimpulkan Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

6. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah pendapatan daerah yang sah, pelampuan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan investasi, dan transfer rekening cadangan. SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah.

Kusnandar (2011) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, Maryadi (2014) berpendapat SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan pemaparan teori diatas dapat disimpulkan SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja modal dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Landasan teoritis diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

III.METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu bertempat di Kabupaten/Kota se-Bali. Penelitian data ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Bali seluruh data terkumpul pada instansi tersebut.

B. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran dan pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal. Keseluruhan obyek yang akan diteliti pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali tahun 2012-2015.

C. Identifikasi Variabel

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat (dependen) (Sugiyono, 2016:59). Variabel bebas digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:59). Variabel yang digunakan dalam variabel ini adalah Alokasi Belanja Modal.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan masa manfaat, meningkatkan kualitas aset.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi salah satu faktor adanya pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya tinggi pula

kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dan lain-lainnya PAD yang sah.

4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, selain dipengaruhi tenaga kerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya presentase bagian daerah penghasilan.

6. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK.

7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Halim (2008:108) menyatakan bahwa selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus terjadi ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah dalam satu tahun diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya, maka akan terjadi defisit APBD. SiLPA adalah indikator efisiensi, karena SiLPA akan berbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.

E. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ialah data sekunder.

F. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono,2016:115), populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2016:116). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali dari tahun 2012 sampai 2015. Sampel ini digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Bali. Teknik ini menggunakan *Metode Jenuh*. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diteliti berjumlah 9 (sembilan) terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya pada Provinsi Bali. Total sampel yang diteliti selama 4 tahun periode penelitian berjumlah 36 sampel.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mengolah dan mencatat data yang berkaitan dengan data penelitian.

H. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum dan minimum, sum ,range, kurtosis dan skweness (kemencangan distribusi) (Ghozali,2016:19). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan

standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas distribusi data dilakukan dengan menggunakan statistik *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2016:154-158). Pada statistik *Kolmogorov-Smirnov*, data yang dikatakan berdistribusi normal jika koefisien *asympt. Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada tolerance value dan variance inflammatory factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,10 dan nilai VIF adalah 10. Jika VIF >10 dan tolerance value <0.10, maka terjadi multikolinearitas tinggi antar variabel independen dengan variabel independen lainnya. Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi jika terjadi multikolinearitas adalah dengan mengeluarkan salah satu variabel independen yang memiliki korelasi yang tinggi dari model regresi dan identifikasi variabel lainnya untuk membantu prediksi (Ghozali, 2016:103).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar t dengan kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada data silang waktu, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena "gangguan" pada observasi yang berbeda berasal dari individu dan kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada cara untuk mendekteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan uji *Durbin Watson (DW test)*. Uji ini digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan

menyarakan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel diantara variabel independen (Ghozali, 2016:107).

d. Uji Heteroskedastisitas (*uji Glejser*)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Jika suatu model regresi yang mengandung gejala heteroskedastisitas akan memberikan hasil prediksi menyimpang. Banyak metode untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, tetapi untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan uji *Glejser* (Ghozali, 2016:137). Metode ini meregresi variabel bebas terhadap absolut residu. Model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika probabilitas signifikan setiap variabel bebas lebih dari 0,05 ($\alpha = 5\%$).

3. Metode Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode regresi linier berganda, yaitu menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hubungan variabel dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2016:215):

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + \beta_4 \text{DBH} + \beta_5 \text{DAK} + \beta_6 \text{SILPA} + e$$

4. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*)

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

Kelemahan penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016:95).

b. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Penelitian ini dalam pengujian model *fit* (kelayakan model) dilakukan dengan uji F. Apabila tingkat signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan model yang dihipotesiskan *fit* dengan data. Sebaliknya, tingkat signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data.

c. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Apabila hasil uji menunjukkan tingkat signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan dapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, tingkat signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan tidak dapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

54.750.000.000 dan standar deviasi 157.284.000.000. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai terendah 12.669.520 dan tertinggi 88.571.500.000 dengan rata-rata 27.790.000.000 dan standar deviasi 27.998.200.000. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki nilai terendah 29.705.467 dan tertinggi 1.203.973.377.001 dengan rata-rata 242.800.000.000 dan standar deviasi 334.100.000.000. Belanja Modal memiliki nilai terendah 70.217.269 dan tertinggi 949.069.337.245 dengan rata-rata 195.500.000.000 dan standar deviasi 240.161.000.000

B. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^a	Mean	.0000156
	Std. Deviation	6.0032386E10
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.090
	Negative	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		.688
Asymp. Sig. (2-tailed)		.731

a. Test distribution is Normal.

(Sumber: data diolah, 2017)

Hasil uji normalitas yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Sminarnov (K-S) sebesar 0,688, sedangkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,731. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,731 lebih besar dari nilai α 0,05.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	36	25667.00	2.84E7	8.1357E6	6.85173E6
PAD	36	3.98E7	3.00E12	4.447E11	7.65930E11
DAU	36	3.87E8	8.69E11	4.217E11	2.81090E11
DBH	36	1.42E7	9.48E11	5.475E10	1.57284E11
DAK	36	1.27E7	8.88E10	2.779E10	2.79982E10
SILPA	36	2.97E7	1.20E12	2.428E11	3.34100E11
Belanja Modal	36	7.02E7	9.49E11	1.955E11	2.40161E11
Valid N (listwise)	36				

(Sumber: data diolah, 2017)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui gambaran tentang distribusi data sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai terendah 25.666.610 dan tertinggi 28.433.247 dengan rata-rata 8.135.000 dan standar deviasi 6.851.730. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai terendah 39.843.602 dan tertinggi 3.001.464.263 dengan rata-rata 444.700.000.000 dan standar deviasi 765.930.000.000. Dana Alokasi Umum memiliki nilai terendah 387.340.103 dan tertinggi 868.511.959.000 dengan rata-rata 421.700.000.000 dan standar deviasi 281.090.000.000. Dana Bagi Hasil memiliki nilai terendah 14.233.393 dan tertinggi 947.573.267.024 dengan rata-rata

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,519	1,92
PDRB	0,366	8
	0,167	2,73
	0,872	1
	0,197	5,98
	0,198	0
SILPA		1,14
		6
		5,08
		1
		5,04
		0

Dependent Variable: Belanja Modal
(Sumber: data diolah, 2017)

Hasil uji multikolonieritas yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel PDRB, PAD, DAU, DBH, DAK, SILPA lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF variabel-variabel tersebut lebih kecil dari 10 yang berarti model yang digunakan tidak terjadi multikorelasi.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,029

- a. Predictors: (Constant), SILPA, DB, DAU, PDRB, PAD, DAK
- b. Dependent Variable: Belanja Modal
(Sumber: data diolah, 2017)

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 2,029, dengan jumlah sampel 36 (n), jumlah variabel independen 6 (K=6) dan nilai $du = 1,876$. Nilai dw 2,029 lebih besar dari du yakni 1,876 dan kurang dari $(4-du)$ $4 - 1,876 = 2,124$, jika dimasukkan ke dalam rumus $du < d < (4-du)$. Persamaan sebagai berikut : $1,876 < 2,029 < 2,124$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.965E10	1.530E10			3.244	.003
PDRB	478.787	1426.944	.084		.336	.740
PAD	.000	.015	-.011		-.036	.971
DAU	-.030	.061	-.215		-.491	.627
DBH	-.049	.048	-.195		-1.018	.317
DAK	.243	.564	.174		.431	.670
SILPA	.001	.050	.004		.010	.992

a. Dependent Variable: ABRES

(Sumber: data diolah, 2017)

Hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai Sig. dari variabel PDRB, PAD, DAU, DBH, DAK, SILPA sebesar 0,740, 0,971, 0,627, 0,317, 0,670, 0,992 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap *absolute residual*. Dengan demikian, model ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

C. Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3,766E10	2,423E10		1,554	0,131
PDRB	-835,405	2258,968	-0,024	-0,370	0,714
PAD	0,257	0,024	0,824	10,671	0,000
DAU	-0,053	0,097	-0,063	-0,549	0,587
DBH	0,058	0,076	0,038	0,763	0,452
DAK	1,313	0,893	0,155	1,470	0,152
SILPA	0,170	0,078	0,228	2,170	0,038

- a. Dependent Variabel: Belanja Modal
(Sumber: data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 5 dapat ditulis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BM = 3,766E10 - 835,405PDRB + 0,257PAD -$$

$$0,053DAU + 0,058DBH + 1,313DAK + 0,170SILPA$$

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model)

- a. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,968	0,937	0,924	6,59509E10

- a. Predictors: (Constant), SILPA, DBH, DBH, DAU, PDRB, PAD, DAK
- b. Dependent Variable: Belanja Modal
(Sumber: data diolah, 2017)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* menunjukkan nilai 0,924. Hal ini berarti bahwa sebesar 92,4 persen variabel Y dijelaskan oleh variabel X, sedangkan sisanya sebesar 7,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Pengujian Goodness Of Fit

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
1	1,866E24	6	3,110E23	71,500	0,000
Regression	1,261E23	29	4,350E21		
Residual	1,992E24	35			
Total	24				

a. Predictors: (Constant), SILPA, DBH, DAU, PDRB, PAD, DAK

b. Dependent Variable: Belanja Modal

(Sumber: data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai f-test = 71,500 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3), dana bagi hasil (X4), dana alokasi khusus (X5) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (X6) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

b. Hasil Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.766E10	2.423E10		1.554	.131		
PDRB	-835.405	2258.968	-.024	-.370	.714	.519	1.928
PAD	.257	.024	.024	10.671	.000	.366	2.731
DAU	-.053	.097	-.063	-.549	.587	.167	5.980
DBH	.058	.076	.038	.763	.452	.872	1.146
DAK	1.313	.893	.155	1.470	.152	.197	5.081
SILPA	.170	.078	.228	2.170	.038	.198	5.040

a. Dependent Variable: Belanja Modal

(Sumber: data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 5.10 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -835,405 dan nilai t hitung sebesar -0,370 sedangkan, nilai signifikansin sebesar 0,714 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H¹ ditolak.

2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal. Pendapatan asli daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,257 dan nilai t hitung sebesar 10,671 sedangkan, nilai signifikansin sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, sehingga H² diterima.
3. Pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal. Dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,53 dan nilai t hitung sebesar -0,549 sedangkan, nilai signifikansin sebesar 0,587 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H³ ditolak.
4. Pengaruh dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal. Dana bagi hasil memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,058 dan nilai t hitung sebesar 0,763 sedangkan, nilai signifikansin sebesar 0,452 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H⁴ ditolak.
5. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal. Dana alokasi khusus memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,313 dan nilai t hitung sebesar 1,470 sedangkan, nilai signifikansin sebesar 0,152 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H⁵ ditolak.
6. Pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,170 dan nilai t hitung sebesar 2,170 sedangkan, nilai signifikansin sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, sehingga H⁶ diterima.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis pertama menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H¹ ditolak. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana langsung kepada daerah. Pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan kondisi perekonomian daerah dan tidak memberikan

pemasukan terhadap daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah. Hasil penelitian sejalan dengan dengan hasil penelitian Tuasikal (2008), Putro (2010), Ardhani (2011) dan Maryadi (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

B. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis kedua menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, sehingga H2 diterima dan membuktikan bahwa anggaran belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli digali di daerah tersebut. Besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD sebesar-besarnya. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tuasikal (2008), Sumarmi (2009), Jaya (2014), Martini, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

C. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis ketiga menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H3 ditolak. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dikarenakan dana alokasi umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal. DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. DAU yang diterima oleh daerah

hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kusnandar dan Dodik (2009) dan Syafitri (2009) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

D. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis keempat menyatakan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H4 ditolak. Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan sumber dana bagi hasil yaitu sumber daya alam dan pajak mengalami fluktuasi tiap tahunnya, sehingga dana bagi hasil tidak tergantung dengan anggaran belanja modal yang di anggarkan dalam mengalokasikan belanja modal di suatu daerah dan belum dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Belanja modal lebih cenderung dipengaruhi oleh PAD dan SiLPA. Hasil penelitian ini sejalan dengan Jiwatami (2013), Sianipar (2011) dan Harahap (2010) yang menyatakan dana bagi hasil tidak berpengaruh alokasi terhadap belanja modal.

E. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis kelima menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sehingga H5 ditolak. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dikarenakan setiap kenaikan pada dana alokasi khusus tidak turut menaikkan pengalokasian belanja modal. Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus yang mana dalam hal ini bidang-bidang yang dibiayai dari DAK terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan. Dana Alokasi Khusus tersebut hanya membiayai pada bidang kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan yang lainnya yang mana ini tidak memerlukan dana yang cukup besar, berbeda dengan belanja modal yang memerlukan dana yang cukup besar. Dana Alokasi Khusus tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal karena Dana Alokasi Khusus ini merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk

membayai atau untuk pembiayaan dari pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat mengkhusus seperti pembiayaan sarana dan prasarana fisik daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ardhani (2011), Santosa dan Rofiq (2013), Meianto, dkk (2013) yang menyatakan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

F. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis keenam menyatakan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, sehingga H6 diterima. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dikarenakan sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat meningkatkan anggaran belanja modal di suatu daerah. Sisa lebih pembiayaan anggaran meningkat maka belanja modal juga akan meningkat sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk kepada pelayanan publik. SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kusnandar dan Dodik (2009) dan Maryadi (2014) yang menyatakan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan periode 2012-2015 memiliki jumlah sampel sebanyak 36 dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja dan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Penelitian :

- a. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih anggaran.
- b. Pada penelitian ini penulis menggunakan tahun pengamatan dari tahun 2012-2015.

2. Saran Penelitian

- a. Peneliti berikutnya sebaiknya menambahkan variabel dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran belanja modal seperti luas wilayah dan belanja pemeliharaan.
- b. Penelitian sebelumnya dimasa mendatang agar dapat memperluas atau menambah periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Tinjauan Atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah*: Direktorat Pembangunan Otonomi Daerah.
- Darwanto dan Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 juli 2007*.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2015. <http://www.djpk.depkeu.go.id>.
- Fatkhunnizar, 2014. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Ghozali, Prof. Dr. H. Imam, M.Com, Akt., 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A dan Abdullah, S, 2006. Hubungan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 No. 1:53-6.
- Hidayat, 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal.

- Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya.
- Harahap, Alfian. 2010. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/>
- Jensen, M.C dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost dan Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic* 3(4): 305-360.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92*
- Jiwatami, Sandhyakalining. 2013. *Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012)*. *Simposium Nasional Akuntansi XVI* , Manado, 25-28 September 2013.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. *Simposium Nasional Akuntansi XV*
- Martini, Ni Luh Dina Selvia, Cipta, Wayan, Suwendra, I Wayan. 2014. Pengaruh PAD , DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012. *E-Journal Bisma Vol.2 Tahun 2014*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Meianto, Edy., Betri., Weny, Cherrya Dhia, 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal*. Palembang.
- Maryadi, 2014. Pengaruh PAD, DAU, Dana Bagi Hasil, SiLPA, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Oktora, F.E. dan W. Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Accountability*. Vol. 2 (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.06/2007 *tentang Bagan Akun Standar*.
- Putro, Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH). *Skripsi S1*. Universitas Diponegoro.
- Permatasari, Isti. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016*.
- Prakarsa, Dwi, Febrian, 2014, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
- Pratama, Caesario. 2014. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008-2012). *Skripsi S1*. Universitas Bengkulu.
- Purnama, Arif. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2013. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Republik Indonesia. 2004. UU No 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Santosa, A.B. dan M.A. Rofiq. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 2 (2).
- Siswanto, 2011. Pengaruh DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Artikel*. Universitas Indonesia.
- Sianipar, Eva Septriani. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Siregar, Anggi Rezeki. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. *Skripsi S-1 Akuntansi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Syafitri. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pen-

- dapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatra Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Suhendra, Septiadi., Sulindawati, Erni., dan Adiputra Pradana. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bali Periode 2009-2013. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 3, No.1 Tahun 2015)*.
- Sumarmi, S. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Akmenipa UPY, Vol 4*.
- Tuasikal, 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol.1 No. 2 Juli 2008* Hal. 142-155. Universitas Pattimura Ambon.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Utama, Made Suyana,. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama. www.bali.bps.go.id
- Wandira. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal. (studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Jurnal of Accounting*. Universitas Diponegoro.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Yovita, Farah Marta. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)”. *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.